

Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Ferdyan Ardhana^{1*}, Irmawati², Cut Fitrika Syawalina³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia

Email: ferdyanardana30@gmail.com¹, irmawati75abdullah@gmail.com², cut.fitrika@unmuha.ac.id³

*Penulis Korespondensi: ferdyanardana30@gmail.com

Abstract: *This study aims to evaluate the management of the Health Operational Assistance Fund (BOK) at the Kuala Bhee Health Center, West Aceh Regency, during the period 2022 to 2024. The method used in this research is quantitative descriptive analysis, which is an approach used to describe data systematically, factually, and accurately based on actual conditions in the field, with the main focus on the management of BOK funds. The analysis was conducted using the effectiveness ratio. The results showed that the management of BOK funds at the Kuala Bhee Health Center has referred to the provisions of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 18 of 2024, which includes the stages of planning, implementing activities, reporting, and monitoring and evaluation. The level of BOK budget realization in 2022 and 2024 was classified as effective because the percentage of realization was in the range of 90-100%. This indicates that the management of funds is carried out well, although there is still a large remaining budget. Meanwhile, in 2023, the budget realization rate was in the range of 80-90%, indicating that the management of funds in that year was quite effective.*

Keywords: *BOK Funds; Budget Effectiveness; Budget Management; Kuala Bhee Community Health Center; West Aceh.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat, selama periode 2022 hingga 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan data secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan kondisi aktual di lapangan, dengan fokus utama pada pengelolaan dana BOK. Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOK di Puskesmas Kuala Bhee telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Tingkat realisasi anggaran BOK pada tahun 2022 dan 2024 tergolong efektif karena persentase realisasi berada dalam kisaran 90–100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan baik, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar. Sementara itu, pada tahun 2023, tingkat realisasi anggaran berada dalam rentang 80–90%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana pada tahun tersebut tergolong cukup efektif.

Kata Kunci: Aceh Barat; Dana BOK; Efektivitas Anggaran; Pengelolaan Anggaran; Puskesmas Kuala Bhee.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memiliki peran yang sangat penting. Pembangunan kesehatan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, pemerataan, dan keberlanjutan. BOK menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. BOK membantu memastikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu dapat menyediakan layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,

termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu. Dana ini digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan operasional yang langsung berdampak pada peningkatan pelayanan.

BOK juga digunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit, baik penyakit menular (seperti malaria, TB, dan HIV/AIDS) maupun penyakit tidak menular (seperti hipertensi dan diabetes). Melalui BOK, fasilitas kesehatan dapat melaksanakan kegiatan promosi kesehatan, penyuluhan, serta deteksi dini penyakit yang berisiko tinggi bagi masyarakat. Dengan adanya BOK, fasilitas kesehatan, terutama puskesmas, memiliki dana untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dana operasional yang cukup memungkinkan puskesmas atau rumah sakit untuk mengembangkan sistem manajemen, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperbaiki sarana dan prasarana yang tersedia.

Keterbatasan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, serta kurangnya kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan manajemen operasional, merupakan tantangan signifikan yang masih dihadapi saat ini. Dalam konteks tersebut, peran pimpinan Puskesmas menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pusat pelayanan kesehatan harus memiliki pengetahuan serta kemampuan manajerial yang memadai, khususnya dalam hal manajemen proyek.

Selain itu, pimpinan pusat pelayanan kesehatan masyarakat juga berperan sebagai manajer dan inovator (Ponno et al., 2024). Pemahaman masing-masing puskesmas dalam merencanakan pemanfaatan BOK juga belum berdasarkan prioritas dana BOK dialokasikan untuk semua secara merata. Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penyerapan dana BOK adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Kondisi ini mengharuskan sebagian petugas di Puskesmas untuk merangkap beberapa tugas sekaligus, sehingga pelaksanaan program tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan dana BOK dan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat realisasi anggaran (Wibowo et al., 2023).

Fenomena yang terjadi dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang sama-sama melakukan penelitian di Puskesmas yaitu seperti penelitian dari Megawati et al. (2023) Analisis efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan Dana BOK di Puskesmas termasuk dalam kategori yang dapat diprediksi (predictable). Hal ini tercermin dari kemampuan pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang tidak secara langsung didanai oleh Dana BOK, namun tetap dapat terlaksana melalui integrasi dengan kegiatan lain yang mendapatkan

pendanaan dari Dana BOK. Selain itu, pengelolaan Dana BOK di Puskesmas juga dikategorikan efektif, sebagaimana terlihat dari peningkatan capaian kinerja antara tahun 2020 dan 2021, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Tingkat kemandirian Puskesmas dalam mengelola dana ini juga masuk dalam kategori *predictable*, yang berarti Puskesmas memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengelola, dan memproyeksikan proses pengelolaan dana secara sistematis untuk menjaga kualitas pelayanan serta hasil yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program UKM. Kemudian hasil penelitian dari Nopel (2022) mengatakan bahwa pengelolaan dana BOK di puskesmas sudah berjalan sesuai petunjuk teknis pengelolaan BOK tahun 2020. Hal ini berarti bahwa pengelolaan dana BOK di puskesmas sudah terlaksana dengan baik. Namun di bagian pelaporan belum terlaksana tepat waktu karena didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk mengetahui realisasi anggaran BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Realisasi BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024.

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase
1	2022	940.932.060	938.932.060	2.000.000	99,79%
2	2023	931.066.200	829.809.266	101.256.934	89,12%
3	2024	739.480.219	675.565.323	63.914.896	91,35%

Sumber: Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat realisasi anggaran BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat terdapat perkembangan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan tingkat persentase semakin menurun, yaitu pada tahun 2023 dengan realisasi yang dicapai masih dibawah 90% meskipun jumlah anggaran anggaran BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan sehingga hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini, karena umumnya jumlah anggaran semakin lama semakin meningkat dari pemerintah pusat. Jumlah anggaran BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 sebesar Rp 940.932.060 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 99,79%, kemudian pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp 829.809.266 dengan tingkat persentase realisasi anggaran 89,12% dan pada tahun 2024 anggaran BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp 675.565.323 dengan tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 91,35%. Menurut pegawai Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat adanya sisa anggaran setiap tahun disebabkan

tidak adanya kasus mengenai kesehatan yang terjadi pada masyarakat kecamatan Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat sehingga anggaran tidak terealisasi dan juga disebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.

Pemerintah terus meningkatkan anggaran dana desa guna mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Dana tersebut bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD, mengalami peningkatan hampir setiap tahun dengan total mencapai Rp71 triliun pada 2024 (Kemenkeu, 2024). Namun, peningkatan alokasi ini diiringi dengan meningkatnya potensi penyimpangan anggaran. Indonesia Corruption Watch mencatat 869 kasus korupsi dana desa sepanjang 2016–2023 dengan kerugian negara mencapai Rp932,5 miliar (ICW, 2023).

Kasus tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pengendalian internal, kompetensi aparatur yang memadai, komitmen organisasi yang kuat, serta prinsip good governance guna meminimalkan resiko fraud (Vousinas, 2019). Desa Jengglunharjo dipilih karena meskipun memiliki alokasi dana desa terendah di Kecamatan Tanggunggunung (Perbup No. 95 Tahun 2023), desa ini memiliki infrastruktur yang cukup baik. Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan juga berisiko menurunkan intensitas pengawasan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Menurut Khusaini (2018:2), pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan atas keuangan daerah. Hal senada juga disampaikan oleh Siregar (2020:11), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas menyeluruh yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah.

Menurut Siregar (2020:11) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang di dalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah bertujuan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Keuangan daerah merujuk pada seluruh aspek yang berkaitan dengan

pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Anggaran

Menurut Suparmoko (2021:145), anggaran merupakan instrumen perencanaan yang berisi proyeksi mengenai penerimaan dan pengeluaran di masa depan, yang umumnya disusun untuk periode satu tahun. Sementara itu, Bastian (2021:25) mendefinisikan anggaran sebagai suatu himpunan pernyataan yang mencerminkan estimasi pendapatan dan belanja yang diperkirakan akan terjadi dalam periode tertentu di masa mendatang.

Menurut Prawironegoro (2021:2) “Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan negara atau daerah, yang mencakup sumber daya yang akan diterima (pendapatan) dan bagaimana sumber daya tersebut akan dibelanjakan (belanja). Anggaran juga berfungsi sebagai representasi alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau program tertentu. Selain itu, anggaran dapat dipahami sebagai suatu instrumen yang memuat estimasi penerimaan dan pengeluaran yang diproyeksikan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode waktu ke depan.

Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik, menurut Mardiasmo (2020:12), adalah alat untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan pengelolaan dana publik. Anggaran menghubungkan perilaku manusia dengan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan keuangan. Anggaran di sektor publik harus dipublikasikan kepada publik untuk kritik, distribusi, dan masukan, tetapi di sektor swasta tetap menjadi rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik.

Halim (2020:102) mengatakan anggaran sektor publik adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek selama tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, anggaran sektor publik adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek selama tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan negara dan daerah, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan layanan dasar, dan mendukung pembangunan ekonomi.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. BOK bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya (Ponno et al., 2024:4). Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, untuk mendukung kelancaran operasional, termasuk biaya kegiatan pelayanan kesehatan, penyediaan obat, alat kesehatan, serta biaya administrasi dan operasional lainnya. BOK bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan terjangkau oleh masyarakat (Wibowo et al., 2023:54).

BOK dapat didefinisikan sebagai bentuk dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil dan miskin, dapat menyediakan layanan kesehatan yang memadai tanpa adanya hambatan finansial yang besar. BOK digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, promosi kesehatan, dan pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu (Megawati et al., 2023:21). BOK adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional fasilitas kesehatan, seperti biaya tenaga medis, obat-obatan, sarana dan prasarana, serta biaya lain yang mendukung operasional sehari-hari. Dana ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh puskesmas atau rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kesehatan (Nopel, 2022:65).

Bantuan BOK diberikan untuk memastikan bahwa puskesmas dapat menjalankan operasinya dengan lancar dan memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Dana BOK digunakan untuk membeli vaksin, obat, alat medis, tenaga medis, dan biaya administrasi dan operasional (Saharuddin & Katjina, 2021:167). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019, alokasi dana untuk bantuan operasional kesehatan per kabupaten/kota dan BOK ditetapkan setiap tahun dengan SK menteri kesehatan.

Efisiensi

Mahmudi (2021:83) mengatakan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisiensi suatu kegiatan atau proyek dilakukan dengan membandingkan input dan output. Sebaliknya, Bastian (2021:59) mengatakan bahwa efisiensi adalah pencapaian output yang paling tinggi dengan input tertentu atau penggunaan input yang paling rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi adalah perbandingan input dan output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target.

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya yang diberikan oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkannya. Tingkat efisiensi suatu organisasi ditentukan oleh rasio output terhadap input; lebih besar rasio ini, lebih efisien organisasi (Mahmudi, 2021:133). Oleh karena itu, efisiensi dapat digambarkan dengan rumus berikut (Mahmudi, 2021:133):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini (Mahmudi, 2021:133):

Tabel 2 Kriteria Efisiensi.

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut Robbins (2020:8), efektivitas mencerminkan sejauh mana suatu hasil atau produk yang dihasilkan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun efektivitas merupakan tanggung jawab individu yang menjalankan aktivitas tersebut, pada akhirnya hasil dari aktivitas tersebut akan kembali pada tujuan utama organisasi, tanpa mempertimbangkan sejauh mana pengorbanan, termasuk biaya, yang dikeluarkan dalam proses pencapaiannya. Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Pemanfaatan input secara efisien dapat meningkatkan tingkat produktivitas, yang menjadi salah satu tujuan utama organisasi di berbagai sektor. Namun, pemahaman yang keliru tentang efisiensi, terutama ketika dianggap semata-mata sebagai bentuk penghematan, dapat menimbulkan risiko. Hal ini dapat menghambat jalannya operasional organisasi dan pada akhirnya berdampak pada pencapaian tujuan serta menurunkan produktivitas yang diharapkan. Mahsun (2021:187) menyatakan bahwa efektivitas merupakan indikator sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rumus efektivitas menurut Mahsun (2021:187) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 3 berikut ini:

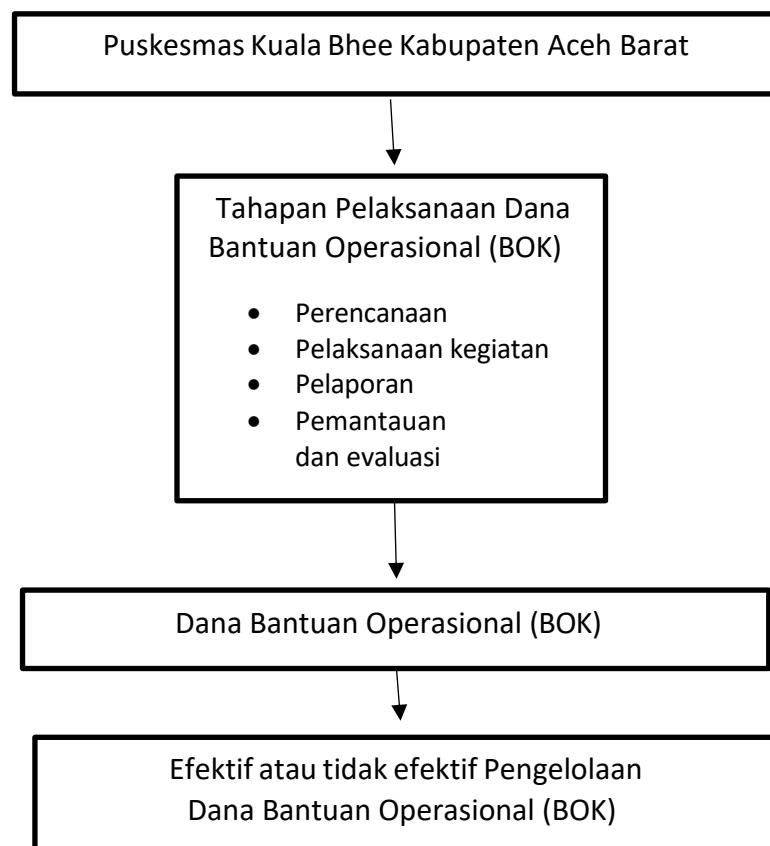
Tabel 3 Kriteria Rasio Efektivitas.

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2021:187

Landasan Berpikir

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang efektif merupakan kunci untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan pengelolaan dana BOK.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2021:49):

- a. Informasi empiris yang dikumpulkan secara langsung dari sumber lapangan disebut data primer. Informasi empiris diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki kemampuan dan bersedia memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Informan-informan ini termasuk pejabat atau kepala bagian instansi yang memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian.
- b. Data Sekunder berupa data laporan keuangan Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat pada periode 2022-2024.

Metode dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti. Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut, menurut Sugiyono (2021:47) Penelitian Lapangan (Field Research), yang berarti pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke objek penelitian.

- a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada petugas puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat. untuk mengetahui sejarah organisasi, struktur organisasi, kinerja keuangan, serta cara mengatasi masalah yang timbul.

- b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan serta menjelaskan temuan penelitian dalam bentuk narasi yang disusun melalui kata-kata dan kalimat, baik berdasarkan data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi berdasarkan kelompok tujuan penelitian, pengelolaan dan interpretasi data, kemudian dilanjutkan dengan proses abstraksi, reduksi, serta verifikasi keabsahan data. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, skema,

dan uraian naratif. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2021:15), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, yang meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan data melalui triangulasi, analisis bersifat induktif, dan hasil akhirnya lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi, adalah proses yang saling terkait dan harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan pengelolaan dana ini, mulai dari memastikan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, mengawasi pelaksanaan kegiatan, memastikan pelaporan yang akurat, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dana BOK digunakan secara optimal demi peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat. Jika setiap tahapan tersebut dilakukan dengan baik, maka tujuan penggunaan dana BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dapat tercapai dengan efektif.

Analisis Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Analisis Perencanaan

Perencanaan adalah langkah pertama yang sangat krusial dalam pengelolaan dana BOK pada Puskesmas Kuala Bhee. Pada tahap ini, pihak Puskesmas bersama dengan pihak terkait seperti dinas kesehatan Kabupaten Aceh Barat, merencanakan alokasi dan penggunaan dana BOK untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Puskesmas Kuala Bhee mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan yang mendesak, seperti pengadaan obat-obatan, vaksin, alat medis, dan kegiatan kesehatan lainnya. Penentuan prioritas berdasarkan data kesehatan dan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat sangat penting untuk merumuskan rencana yang tepat. Puskesmas membuat rincian anggaran yang jelas, misalnya untuk biaya operasional

harian, biaya tenaga kesehatan, pelatihan staf, serta perbaikan sarana prasarana. Rencana anggaran harus disusun berdasarkan standar biaya yang berlaku dan harus memperhitungkan efisiensi serta kebutuhan yang mendesak. Menentukan indikator keberhasilan dalam penggunaan dana BOK, seperti peningkatan cakupan imunisasi, pengurangan angka kematian ibu dan bayi, atau meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Kuala Bhee.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat saat ini dari perencanaan setiap tahun dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena tidak ada hambatan bagi pegawai atau aparatur Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat. Puskesmas Kuala Bhee telah melakukan perencanaan yang matang dan berbasis pada data dan kebutuhan lokal. Rencana penggunaan dana BOK disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan disesuaikan dengan prioritas kesehatan di daerah tersebut.

Analisis Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dana BOK yang telah direncanakan digunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan. Puskesmas Kuala Bhee harus memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Puskesmas memonitor apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan apakah dana digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Penggunaan dana harus tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kesehatan yang telah ditentukan. Dana harus digunakan dengan bijak dan efisien, seperti dalam pengadaan alat medis, biaya administrasi, dan biaya operasional lainnya. Puskesmas juga perlu memastikan bahwa tidak ada pemborosan atau penggunaan dana yang tidak perlu. Selama pelaksanaan, Puskesmas perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, misalnya melalui laporan berkala atau supervisi untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat saat ini dari pelaksanaan setiap tahun dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Setiap tahun, dana BOK digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan kesehatan, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, serta penyediaan obat dan alat kesehatan. Puskesmas mampu melaksanakan program-program kesehatan dengan baik sesuai anggaran yang tersedia, dan pelayanan kesehatan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan penggunaan dana yang tepat, Puskesmas Kuala Bhee dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan angka imunisasi, akses kesehatan ibu dan anak, serta penanganan penyakit menular yang lebih baik.

Analisis Pelaporan

Pencatatan dan pembukuan yang akurat adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK. Puskesmas Kuala Bhee harus mencatat semua transaksi keuangan dengan rapi dan tepat. Semua pengeluaran dana BOK harus dicatat dengan jelas dalam buku kas atau sistem pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setiap transaksi harus tercatat dengan lengkap, termasuk tanggal, jumlah, dan rincian penggunaan. Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah seperti kuitansi, faktur, atau dokumen lain yang relevan untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Pembukuan harus selalu dipantau dan diperiksa secara rutin untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan yang dapat berpotensi mengganggu akuntabilitas.

Pelaporan adalah bagian terakhir dari pengelolaan dana BOK yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada pihak yang berkepentingan. Puskesmas Kuala Bhee harus menyusun laporan yang dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau masyarakat. Analisis pelaporan mencakup Puskesmas perlu menyusun laporan secara berkala (misalnya bulanan atau tahunan) mengenai penggunaan dana BOK, yang meliputi penggunaan anggaran, pencapaian hasil, dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Laporan yang disusun harus sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Semua laporan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Laporan harus disusun dengan transparan dan mudah diakses oleh semua pihak. Laporan harus disusun dengan transparan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana BOK di Puskesmas Kuala Bhee.

Tahap pertanggungjawaban adalah saat Puskesmas Kuala Bhee menyusun laporan yang menggambarkan penggunaan dana BOK dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis pertanggungjawaban mencakup Puskesmas harus membuat laporan keuangan yang memuat rincian penggunaan dana BOK, termasuk pengeluaran untuk setiap pos anggaran. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Kuala Bhee secara rutin dan transparan melaporkan penggunaan dana BOK kepada pihak berwenang. Laporan yang disusun mencakup rincian penggunaan dana yang jelas, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Puskesmas juga memastikan bahwa pelaporan penggunaan dana BOK dilakukan secara

transparan dan tepat waktu, dengan rincian yang jelas, sehingga pengelolaan dana dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak berwenang.

Analisis Pemantauan dan Evaluasi

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat, tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang tepat, tetapi juga memerlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa dana BOK digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pemantauan ini bertujuan untuk memeriksa apakah kegiatan yang direncanakan dalam pengelolaan dana BOK telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Misalnya, pengadaan obat-obatan, vaksin, atau alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pelayanan di Puskesmas. Puskesmas juga memantau pelaksanaan kegiatan lainnya seperti pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelatihan tenaga medis. Pemantauan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi dana BOK telah digunakan sesuai dengan rincian anggaran. Puskesmas harus memeriksa apakah pengeluaran dana tercatat dengan jelas dan sesuai dengan pos anggaran yang telah ditentukan. Semua transaksi keuangan harus dipantau secara transparan agar tidak ada penyimpangan atau pemborosan. Puskesmas Kuala Bhee juga harus menyusun laporan pemantauan secara berkala, baik itu laporan bulanan maupun tahunan, yang mencakup informasi tentang penggunaan dana BOK dan progres kegiatan yang telah dilakukan. Laporan ini akan digunakan untuk mengevaluasi apakah dana tersebut telah digunakan dengan optimal. Evaluasi ini berfokus pada apakah dana yang digunakan telah sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Puskesmas melakukan analisis apakah ada sisa dana yang tidak terpakai atau apakah ada pengeluaran yang melebihi anggaran yang ditetapkan. Evaluasi keuangan juga mengidentifikasi apakah dana telah digunakan secara efisien dan tidak ada pemborosan. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai apakah program yang dibiayai oleh dana BOK mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, jika dana digunakan untuk program pencegahan penyakit, evaluasi dapat melihat apakah jumlah kasus penyakit menurun atau jika ada peningkatan jumlah peserta yang mengikuti program kesehatan. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan di Puskesmas. Puskesmas Kuala Bhee harus mengevaluasi sejauh mana dana BOK berhasil mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Ini termasuk menilai pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti cakupan imunisasi, kunjungan pasien, atau kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun, Puskesmas Kuala Bhee menjalankan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh BOK. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan dan optimalisasi pengelolaan dana pada tahun berikutnya. Pemantauan terhadap kegiatan yang didanai oleh BOK dilakukan secara berkala, dan hasilnya dievaluasi untuk memastikan pencapaian tujuan. Evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengoptimalan pengelolaan dana di masa depan.

Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Untuk mengetahui efektifitas alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat digunakan rumus (Mahsun, 2014:187):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

- a. Efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022

$$\frac{938.932.060}{940.932.060} \times 100\% = 99,79\%$$

- b. Efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2023

$$\frac{931.066.200}{829.809.266} \times 100\% = 89,12\%$$

- c. Efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2024

$$\frac{675.565.323}{739.480.219} \times 100\% = 91,35\%$$

Untuk mengetahui jumlah efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2022 s/d 2024.

No	Tahun	Target Anggaran Dana BOK (Rp)	Realisasi Dana us/Defisif (Rp)			Keterangan
			BOK (Rp)		Persentase	
1	2022	940.932.060	938.932.060	2.000.000	99,79%	Efektif
2	2023	931.066.200	829.809.266	101.256.934	89,12%	Cukup Efektif
3	2024	739.480.219	675.565.323	63.914.896	91,35%	Efektif

Sumber : Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, diketahui bahwa pada tahun 2022 alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 940.932.060 dengan tingkat realisasi mencapai Rp 938.932.060 atau setara dengan 99,79% dari total anggaran. Sementara itu, pada tahun 2023 anggaran yang dialokasikan untuk dana BOK sebesar Rp 931.066.200 dengan realisasi sebesar Rp 829.809.266, atau sekitar 89,12% dari total anggaran yang tersedia. Pada tahun 2024, dana BOK yang dianggarkan sebesar Rp 739.480.219 dan terealisasi sebesar Rp 675.565.323, dengan tingkat serapan sebesar 91,35%. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat efektivitas penggunaan anggaran BOK dari tahun ke tahun.

Pembahasan

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat, yang meliputi empat tahapan utama sesuai Pasal 15, yaitu perencanaan dan persiapan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOK membutuhkan koordinasi yang baik antara Puskesmas dan pemerintah daerah. ahap perencanaan dan persiapan teknis yang matang menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana BOK. Identifikasi kebutuhan kesehatan yang akurat, serta penyusunan anggaran yang sesuai dengan prioritas kegiatan, akan sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perencanaan ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan yang baik memerlukan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang efisien. Dana BOK yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengadaan obat, pelayanan kesehatan dasar, pelatihan SDM, dan promosi kesehatan, harus dikelola dengan baik untuk memastikan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Koordinasi yang baik antara Puskesmas dan

pemerintah daerah menjadi kunci dalam tahap ini. Pelaporan yang transparan dan akurat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

Pemerintah daerah perlu memantau laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala untuk memastikan dana digunakan dengan tepat sesuai dengan rencana. Ketidakesesuaian atau keterlambatan dalam pelaporan bisa mengurangi kredibilitas pengelolaan dana BOK. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan membantu untuk menilai efektivitas penggunaan dana dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul. Pemerintah daerah harus memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana BOK memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Efektifitas Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2022 s/d 2024.

No	Tahun	Anggaran dana BOK	Realisasi Anggaran dana BOK	Suflus/Defisit	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2022	940.932.060	938.932.060	2.000.000	99,79%	Efektif
2	2023	931.066.200	829.809.266	101.256.934	89,12%	Cukup Efektif
3	2024	739.480.219	675.565.323	63.914.896	91,35%	Efektif

Sumber : Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat (2025)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas mengenai realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 sampai 2024 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2022 realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 938.932.060 dari anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 940.932.060 dengan tingkat persentase 99,79%, artinya masih ada sisa anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 2.000.000 yang tidak digunakan oleh pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan efektif karena

tingkat persentase antara 90-100%.

2. Pada tahun 2023 realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 829.809.266 dari total anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 931.066.200 dengan tingkat persentase 100%, artinya penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) lebih dari target anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 101.256.934. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2023 Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan cukup efektif karena tingkat persentase antara 80- 90%.

Pada tahun 2024 realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 675.565.323 dari total anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 739.480.219 dengan tingkat persentase 91,35%, artinya penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) lebih dari target anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 63.914.896. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2024 Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat, yang tidak terealisasi hingga 100% dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu alasan yang dapat menyebabkan dana BOK tidak terealisasi secara penuh adalah keterlambatan dalam pengajuan atau proses administrasi yang berkaitan dengan pencairan dana. Jika ada kendala dalam proses administrasi, seperti ketidaksesuaian dokumen atau proses verifikasi yang memakan waktu, pencairan dana bisa tertunda, yang akhirnya menghambat realisasi anggaran. Kemudian jika anggaran dan kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana dalam waktu yang telah ditentukan, sebagian dana mungkin tidak dapat digunakan secara optimal. Proses pelaksanaan yang terlambat atau terhambat oleh berbagai faktor dapat menyebabkan dana tidak terealisasi sepenuhnya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi,

2. Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2022 dan tahun 2024 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%. Artinya pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2022 dan 2024 dikelola dengan baik walaupun masih banyak sisa anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kemudian Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2023 dapat dikelola dengan cukup efektif karena tingkat persentase antara 80-90%.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Puskesmas perlu memastikan bahwa perencanaan kegiatan dan anggaran BOK didasarkan pada data yang akurat mengenai kondisi kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan.
2. Pelatihan berkala bagi staf Puskesmas dalam hal pengelolaan keuangan, administrasi, dan pelaporan sangat penting agar dana BOK dikelola secara transparan dan akuntabel.
3. Memastikan bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan prosedur yang berlaku, serta mampu membuat laporan keuangan yang jelas dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi kedua). FE UGM.
- Halim, A. (2020). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Herawati, T. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *STAR: Study & Accounting Research*, 11(1), 1–14.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. UB Press.
- Mahmudi. (2021). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2021). *Pengukuran kinerja sektor publik* (Edisi pertama). BPFE.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Megawati, S., Hartono, A., & Ulfah, I. K. (2023). Analisis efisiensi, efektivitas, dan tingkat kemandirian penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam rangka

- menilai capaian kinerja di Puskesmas Gemaharjo Kabupaten Pacitan. *The Academy of Management and Business*, 2(1), 20–32.
- Nopel, P. (2022). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci Tahun 2020. *JAN Maha*, 4(4), 63–71.
- Ponno, H., Marampa, A. M., & Ta'dung, Y. (2024). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Awan Rantekarua. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(2), 1–7.
- Prawironegoro, D. (2021). *Akuntansi manajemen* (Edisi kedua). Mitra Wacana Media.
- Robbins, S. P., & Judge, T. (2020). *Perilaku organisasi*. Salemba Empat.
- Saharuddin, L. O., & Katjina, H. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. (*Nama jurnal tidak tersedia – perlu dilengkapi*).
- Siregar, B. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual*. UPP-STIM YKPN.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmoko. (2021). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2021). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.
- Wibowo, H., Nurcihikita, T., & Kurniawan, J. (2023). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kerja dinas kesehatan tahun 2023. *Jurnal Informatika Medis (J-INFORMED)*, 1(2), 53–60.